

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
TRIWULAN I TAHUN 2023

(Periode Survei: Januari – Maret)

Berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
2023

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
TRIWULAN I TAHUN 2023
(Periode Survei: Januari – Maret)

Berdasarkan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

Disahkan di Surabaya
Pada Hari Kamis, Tanggal 27 April 2023

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya,


Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.
NIP. 19571011 198503 1 001

Koordinator Tim Survei,


RINI SETIAWATI, S.E.
NIP. 19750929 200604 2 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
BAB I KUISIONER SURVEI	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Survei.....	1
C. Ruang Lingkup Survei	2
BAB II METODOLOGI SURVEI	4
A. Kriteria Responden	4
B. Metode Pencacahan.....	4
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	5
1. Pengolahan Data.....	5
2. Analisis Data	6
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	7
A. Analisis Hasil Survei.....	7
1. Jenis Kelamin.....	7
2. Usia.....	7
3. Pendidikan	8
4. Pekerjaan.....	9
5. Jenis Pelayanan.....	10
B. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).....	11
C. Tindak Lanjut Hasil Survei.....	20
BAB IV DATA SURVEI.....	22
A. Data Responden.....	22
B. Data Dukung Lainnya.....	25
1. Formulir Survei	25
2. Contoh Tangkapan Layar pada Perangkat Responden yang Telah Mengirim Hasil Pengisian Kuisisioner Survei.....	27
3. Keputusan Pembentukan Tim Survei	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi	5
Tabel 2.	Jenis Kelamin Responden SPAK	7
Tabel 3.	Usia Responden SPAK	7
Tabel 4.	Pendidikan Responden SPAK	8
Tabel 5.	Pekerjaan Responden SPAK	9
Tabel 6.	Jenis Pelayanan yang Diterima Responden SPAK	10
Tabel 7.	Data Penghitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi	11
Tabel 8.	Kategori Nilai Persepsi Setiap Unsur Kuisisioner SPAK	12
Tabel 9.	Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 1 dalam Kuisisioner SPAK	13
Tabel 10.	Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 2 dalam Kuisisioner SPAK	15
Tabel 11.	Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 3 dalam Kuisisioner SPAK	16
Tabel 12.	Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 4 dalam Kuisisioner SPAK	18
Tabel 13.	Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 5 dalam Kuisisioner SPAK	19
Tabel 14.	Data Kuisisioner Isian Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	22

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.	Jenis Kelamin Responden SPAK	7
Diagram 2.	Rentang Usia Responden SPAK	8
Diagram 3.	Tingkat Pendidikan Responden SPAK	9
Diagram 4.	Pekerjaan Responden SPAK	10
Diagram 5.	Jenis Pelayanan yang Diterima Responden SPAK	11
Diagram 6.	Nilai Persepsi Setiap Pernyataan Kuisisioner	13
Diagram 7.	Rata-Rata Bintang pada Pernyataan 1 dalam Kuisisioner SPAK	13
Diagram 8.	Rata-Rata Bintang pada Pernyataan 2 dalam Kuisisioner SPAK	15
Diagram 9.	Rata-Rata Bintang pada Pernyataan 3 dalam Kuisisioner SPAK	16
Diagram 10.	Rata-Rata Bintang pada Pernyataan 4 dalam Kuisisioner SPAK	18
Diagram 11.	Rata-Rata Bintang pada Pernyataan 5 dalam Kuisisioner SPAK	19

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kami melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi pengguna layanan terhadap kondisi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sekaligus untuk mengetahui kekurangan dan potensi perlunya perbaikan dalam pelayanan.

Survei dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada para pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, melalui alamat *Uniform Resource Locator* (URL). Kuesioner tersebut berisi pertanyaan tentang perlakuan diskriminatif, layanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan, penerimaan atau permintaan imbalan di luar ketentuan, praktik pungutan liar, dan percaloan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam laporan ini, kami akan memaparkan hasil survei dan analisisnya, termasuk rekomendasi tindak lanjut terhadap data yang diperoleh.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi, yaitu kualitas persepsi korupsi dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi korupsi yang diterima dengan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam penerimaan layanan dan anggapan terhadap anti korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang diambil melalui kuesioner.

Kami berterima kasih kepada seluruh responden yang telah memberikan waktu dan partisipasinya dalam survei ini. Tanpa dukungan dari para responden, survei ini tidak akan terlaksana dengan baik. Sekian kata pengantar dari kami, semoga laporan ini bermanfaat bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan masyarakat luas.

Surabaya, 27 April 2023

Hormat kami,

Ttd.

Tim Survei

BAB I

KUISIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai salah satu satuan kerja Mahkamah Agung selaku Instansi Pemerintah, menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi diarahkan pada 3 (tiga) kondisi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat banding adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tingkat keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya salah satunya ditentukan oleh tingkat kepuasan pengguna layanan di pengadilan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) guna menilai anggapan/persepsi masyarakat terhadap implementasi komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam mewujudkan Wilayah yang Bersih dari Korupsi.

Hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tersebut akan menjadi masukan penting bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, hasil survei tersebut juga dapat membantu pengadilan memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan yang ada, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan profesionalisme Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

B. Tujuan Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

3. Menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi; dan
4. Membantu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menyusun strategi dan program aksi lanjutan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas institusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi.

C. Ruang Lingkup Survei

Ruang lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, penyusunan kuesioner, pelaksanaan survei, pengolahan data, analisis hasil survei, pelaporan hasil survei, dan rencana tindak lanjut.

Tujuan utama Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah untuk mengukur tingkat persepsi dan pemahaman terhadap anti-korupsi di kalangan pengguna layanan terkait kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hasil survei ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan pengadilan dalam mencegah dan memberantas tindak korupsi.

Selain itu, hasil survei juga dapat digunakan sebagai masukan bagi lembaga anti korupsi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pengadilan. Responden diminta untuk memberikan skor penilaian terhadap pernyataan kuesioner yang terkait dengan empat unit layanan yang salah satunya telah diterima pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Keempat unit layanan tersebut, yaitu:

1. Penyelesaian Perkara (Pelayanan Gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pelayanan Administrasi Banding, Pelayanan Upaya Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama);
2. Pengambilan Produk Pengadilan (Pelayanan Salinan Putusan, Pelayanan Surat Kuasa, Pelayanan Izin Penelitian dan Riset);
3. Informasi dan Pengaduan (Permohonan Informasi, Penanganan Pengaduan); dan
4. Pembinaan dan Pengawasan (Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Kompetensi).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengajukan pernyataan dalam kuesioner kepada responden sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor (suku, agama, kekerabatan, almameter, dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyebortan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll. di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll. diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, *resort* perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, *voucher* belanja, dll.) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terimakasih”, dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

Teknik pengumpulan data atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam survei ini adalah dengan cara survei *online*, yaitu Responden diminta untuk mengisi kuesioner secara *online* melalui *browser* pada perangkat pintarnya (*personal computer* atau *smart phone*) dengan menggunakan data internet. Teknik ini dapat menghemat waktu dan biaya, serta memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan mudah. Kuisisioner Survei tersebut disajikan dalam situs web <https://survey.zohopublic.com>, dan formulirnya dapat diakses melalui tautan <http://s.djmt.id/surveiZ12023>.

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Subjek yang dijadikan sebagai populasi untuk menentukan sampel pada Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2023 ini, merupakan penerima layanan yang telah selesai menerima salah satu dari 4 (empat) jenis layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang disebutkan pada BAB sebelumnya. Kriteria responden yang digunakan dalam survei ini diambil secara acak dari pengguna layanan. Selain itu, kriteria responden yang diambil ini mencakup variasi yang cukup beragam dari karakteristik masyarakat, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain, untuk memastikan bahwa hasil survei dapat mewakili/merepresentasikan seluruh pengguna layanan dengan baik.

B. Metode Pencacahan

Pencacahan dilakukan untuk mendapatkan hasil Survei yang menggambarkan penilaian Responden secara umum yang diisi dalam Kuisisioner. Rentang Persepsi yang dihasilkan, yaitu antara 1 (satu) s/d 4 (empat). Semakin rendah hasil penilaian yang diberikan oleh Responden, berarti semakin rendah juga Persepsi Responden terhadap Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Demikian juga sebaliknya, semakin tinggi hasil penilaian yang diberikan Responden, maka semakin tinggi juga Persepsi Responden terhadap Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Pelaksanaan survei dilakukan pada rentang waktu tanggal 11 April 2023 sampai dengan 24 April 2023. Metode pencacahan yang digunakan adalah secara *online*, di mana responden yang telah menerima layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diberikan alamat URL <http://s.djmt.id/surveiZI2023> yang telah dibuatkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Alamat URL ini akan digunakan untuk mengisi formulir survei. Dalam hal ini, responden dapat mengisi survei di mana saja selama mereka memiliki akses internet dan perangkat yang diperlukan, seperti komputer atau ponsel pintar.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan responden survei ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian atau survei yang dilakukan. Dalam hal ini, responden dipilih berdasarkan dua kriteria tertentu, yaitu pengguna layanan yang telah menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam jangka waktu 6 bulan terakhir dan pengguna layanan yang pernah memberikan masukan atau keluhan terhadap layanan tersebut. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan survei yang dilakukan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

1. Pengolahan Data

Setiap responden diminta untuk mengisi kuesioner mengenai data karakteristik dan memilih jenis layanan. Setelah itu, responden diminta untuk menilai 5 (lima) pernyataan kuesioner yang telah disusun. Setiap pernyataan kuesioner memiliki skor bintang (★) dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), dengan penjelasan skor penilaian sebagai berikut:

- ★ Sangat Tidak Setuju
- ★★ Tidak Setuju
- ★★★ Kurang Setuju
- ★★★★ Setuju
- ★★★★★ Sangat Setuju
- ★★★★★★ Sangat Setuju Sekali

Untuk mendapatkan tingkat persepsi responden, setiap bintang yang dipilih oleh Responden pada setiap unsur penilaian dalam kuisisioner Survei Persepsi Anti Korupsi dijumlahkan. Setelah didapatkan jumlah bintang, maka selanjutnya diterapkan rumus untuk mendapatkan Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsinya. Rumus yang diterapkan, yaitu total jumlah bintang dibagi (:) jumlah Responden yang telah dikali (x) 30 (tiga puluh), kemudian dikali (x) 4 (empat), [Nilai IPAK = $\frac{\text{Total Jumlah Bintang}}{(\text{Jumlah Responden} \times 30)} \times 4$]. Sedangkan untuk mengetahui persentasenya, maka diterapkan rumus Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dibagi 4 (empat), kemudian dikali 100 ($\frac{\text{Nilai IPAK}}{4} \times 100$).

Hasil yang diperoleh berdasarkan penghitungan Nilai IPAK tersebut merupakan nilai antara 1 (satu) s/d 4 (empat), dan masing-masing nilainya merepresentasikan Mutu dan Kinerja Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang digambarkan melalui tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi

NO.	NILAI IPAK	PERSENTASE	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	(D) Tidak Baik	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	(C) Kurang Baik	Kurang Bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	(B) Baik	Cukup bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	(A) Sangat Baik	Bersih dari Korupsi

2. Analisis Data

Setelah diperoleh hasil pengolahan data SPAK, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari survei tersebut. Analisa masing-masing unsur SPAK dilakukan dengan cara Analisa Univariat. Analisa Univariat digunakan untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul dengan menguraikan hasil temuan dari data yang diperoleh dalam kuisisioner. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti tabulasi data dan persentase yang diwujudkan dalam grafik/diagram serta deskripsi dari hasil masing-masing unsur yang disurvei.

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

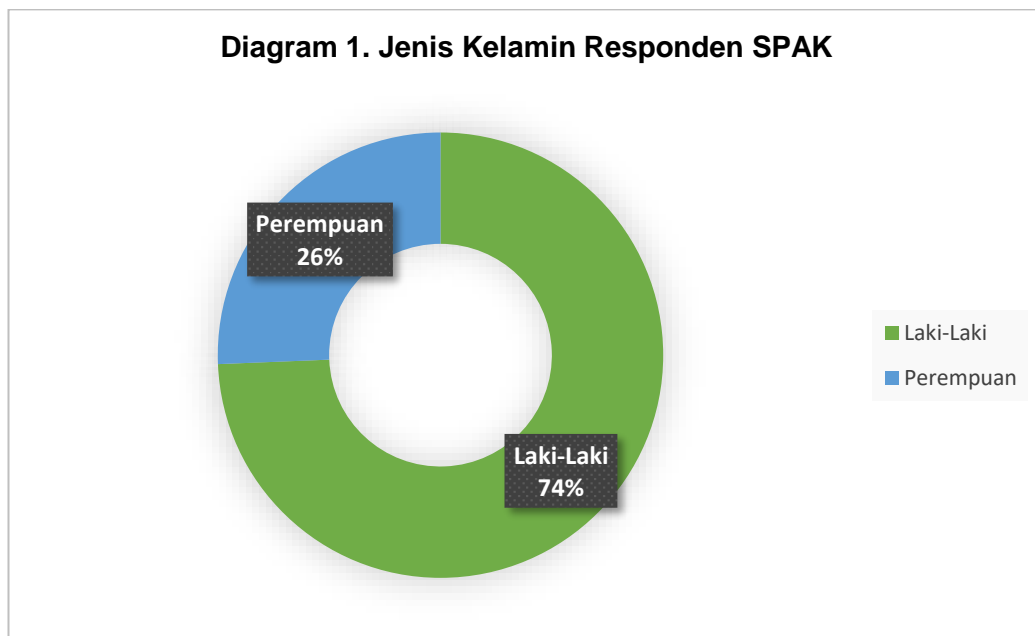
A. Analisis Hasil Survei

Teknik analisis data Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menggunakan Statistik Deskriptif yaitu digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang didapatkan dari pengisian kuisisioner.

1. Jenis Kelamin

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden SPAK

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	29	74,36
2.	Perempuan	10	25,64
Jumlah		39	100



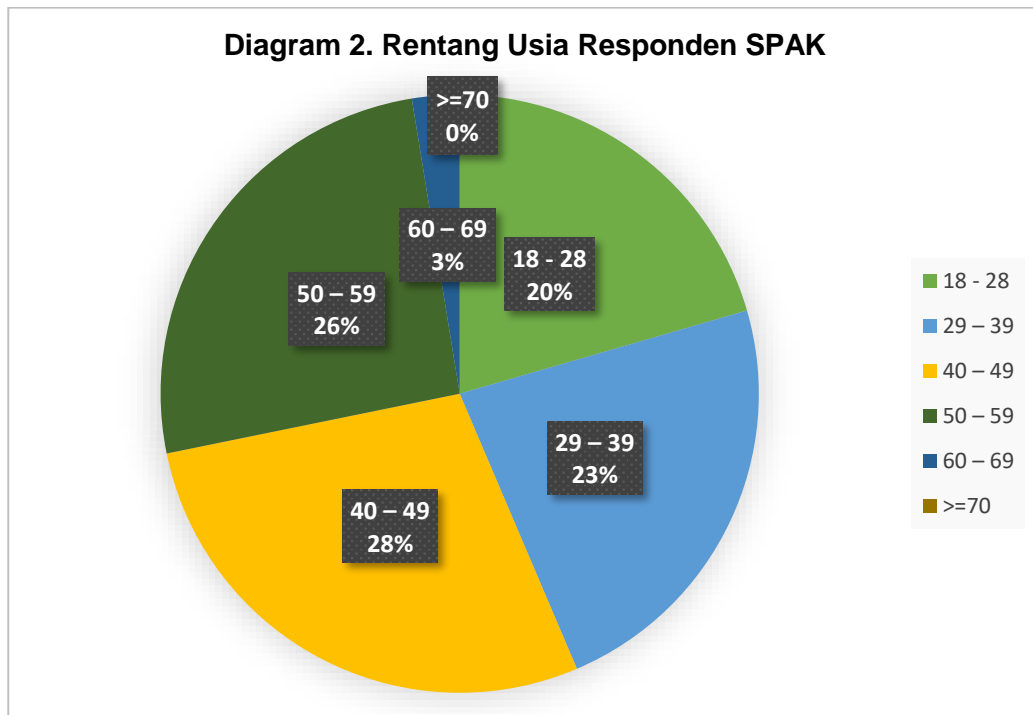
Tabel 2 tersebut menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dan dapat dilakukan analisis data hasil survey, yaitu proporsi responden pada survei ini terdiri dari 74,36% Laki-laki dan 25,64% Perempuan. Hal ini dapat digunakan untuk memahami kecenderungan identitas pengguna layanan yang menggunakan layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Usia

Tabel 3. Usia Responden SPAK

No.	Rentang Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 - 28	8	20,51
2.	29 - 39	9	23,08
3.	40 - 49	11	28,21

4.	50 – 59	10	25,64
5.	60 – 69	1	2,56
6.	>=70	0	0,00
Jumlah		39	100



Persentase jumlah responden dengan rentang usia 40-49 tahun menjadi yang tertinggi dengan jumlah 11 orang atau 28,21% dari jumlah total seluruh responden SPAK, yaitu 39 (tiga puluh sembilan) responden. Disusul dengan responden dengan rentang usia 50-59 tahun, yaitu sebanyak 10 orang atau 25,64% dari jumlah total seluruh responden. Kemudian responden dengan rentang usia 29-39 tahun sebanyak 9 orang atau 23,08% dari jumlah total seluruh responden. Responden dengan rentang usia 18-28 tahun sebanyak 8 orang atau 20,51% dari jumlah total seluruh responden. Selain itu, responden dengan rentang usia 60-69 tahun berjumlah 1 orang atau 2,56% dari jumlah total seluruh responden, dan tidak ada responden dengan rentang usia lebih dari 70 tahun.

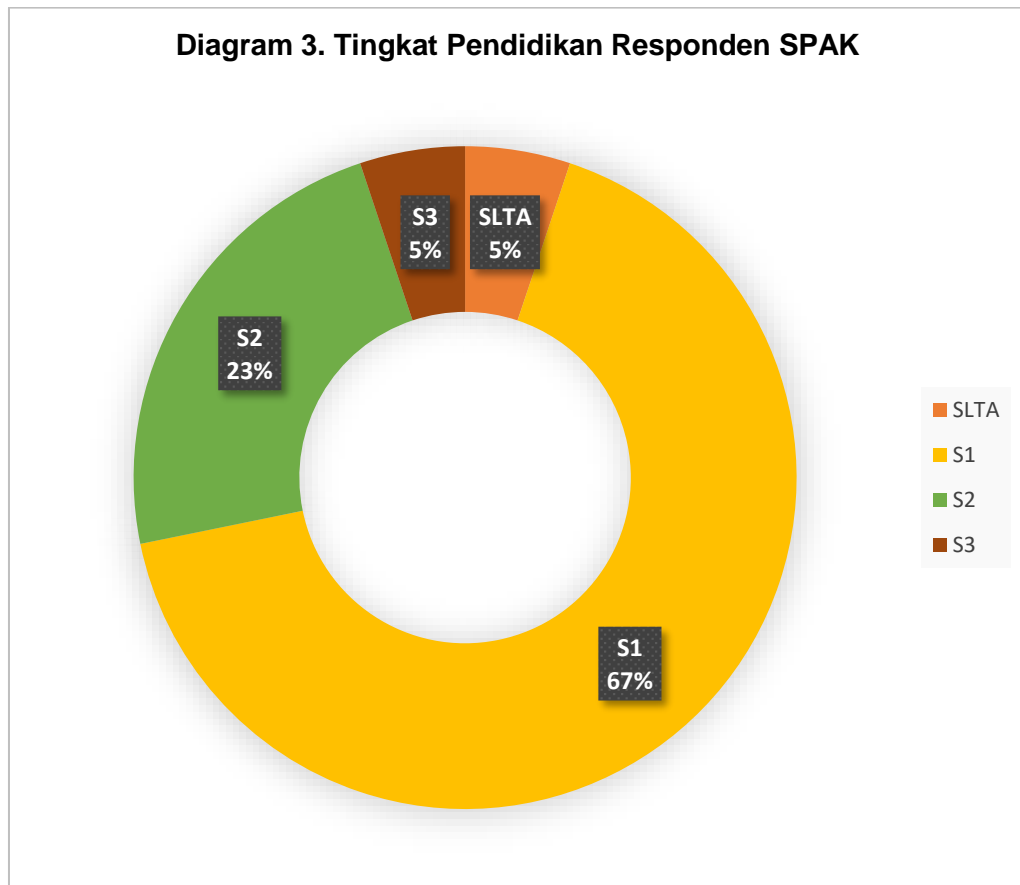
Hasil analisis ini dapat membantu pengelola layanan untuk lebih memahami preferensi dan kebutuhan pengguna layanan di berbagai rentang usia, serta membantu pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan yang disesuaikan dengan karakteristik usia responden.

3. Pendidikan

Tabel 4. Pendidikan Responden SPAK

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SLTA	2	5,13

2.	S1	26	66,67
3.	S2	9	23,08
4.	S3	2	5,13
Jumlah		39	100



Pendidikan yang telah ditempuh masing-masing Responden juga beragam, yaitu 2 (dua) Responden atau 5,13% berpendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, 26 (dua puluh enam) atau 66,67% lainnya berpendidikan Strata I (S1), 9 (sembilan) Responden atau 23,08% berpendidikan Strata II (S2), dan 2 (dua) Responden atau 5,13% lainnya berpendidikan Strata III (S3).

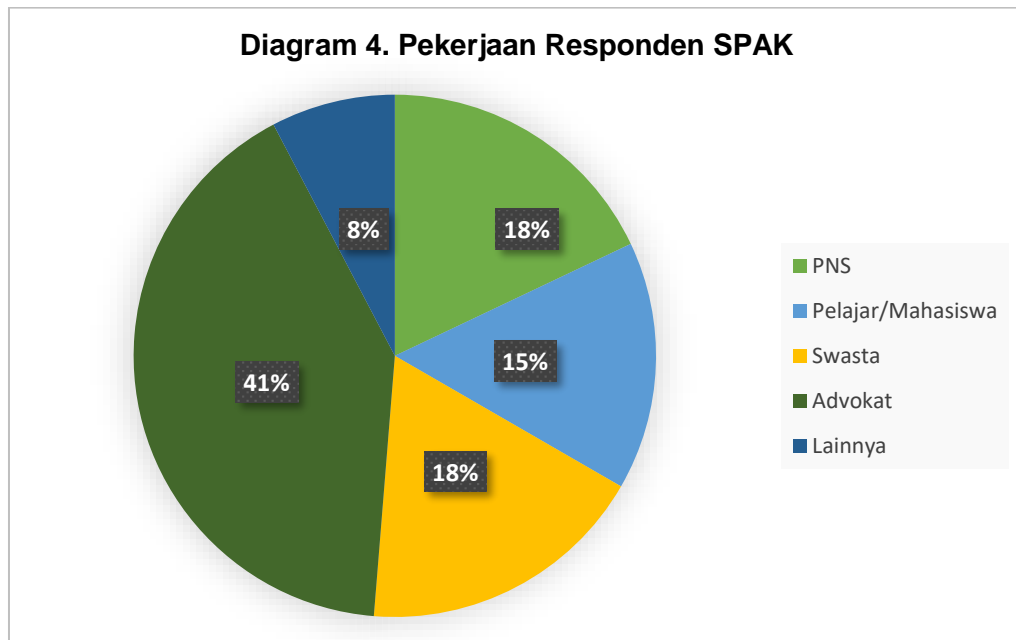
Analisis ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan tinggi, sehingga dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan tanggapan yang diberikan oleh responden dalam survei.

4. Pekerjaan

Tabel 5. Pekerjaan Responden SPAK

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	PNS/ASN	7	17,95
2.	Pelajar/Mahasiswa	6	15,38

3.	Swasta	7	17,95
4.	Advokat	16	41,03
5.	Lainnya	3	7,69
Jumlah		39	100



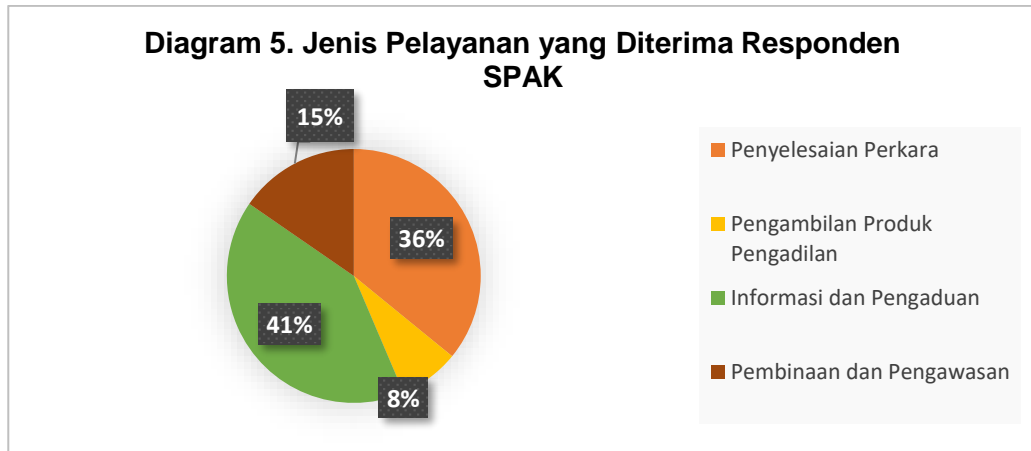
Selain itu, dalam hal profesi/pekerjaan, 7 (tujuh) atau 17,95% Responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), 6 (enam) atau 15,38% diantaranya sebagai Pelajar/Mahasiswa, 7 (tujuh) atau 17,95% Responden bekerja pada sektor Swasta, 16 (enam belas) atau 41,03% lainnya sebagai Advokat, dan 3 (tiga) atau 7,69% Responden bekerja pada sektor/bidang yang lain.

Hal ini dapat memberikan gambaran kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang profil responden dalam hal pekerjaan, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan responden.

5. Jenis Pelayanan

Tabel 6. Jenis Pelayanan yang Diterima Responden SPAK

No.	Jenis Pelayanan yang Diterima	Frekuensi	(%)
1.	Penyelesaian Perkara	14	35,90
2.	Pengambilan Produk Pengadilan	3	7,69
3.	Informasi dan Pengaduan	16	41,03
4.	Pembinaan dan Pengawasan	6	15,38
Jumlah		39	100



Dalam kaitannya dengan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setiap Responden juga telah menerima Pelayanan pada jenis yang berbeda-beda. Tabel 6 menyajikan data mengenai jenis layanan yang disediakan dan jumlah frekuensi serta persentase penggunaan layanan oleh responden. Sebanyak 14 (empat belas) atau 35,90% Responden telah menerima Pelayanan Penyelesaian Perkara, 3 (tiga) atau 7,69% Responden menerima Pelayanan Pengambilan Produk Pengadilan, 16 (enam belas) atau 41,03% diantaranya telah menerima Pelayanan Informasi dan Pengaduan, serta 6 (enam) atau 15,38% Responden telah menerima Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan.

B. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Berdasarkan hasil penghitungan terhadap bintang yang diberikan oleh responden dalam setiap unsur pernyataan pada kuisisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), diketahui bahwa Nilai **Indeks Persepsi Anti Korupsi** di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah **3,63** dengan capaian persentase **90,68%** dan masuk pada kategori **mutu A (Sangat Baik)**, yang berarti **Bersih dari Korupsi**. Berikut ini merupakan Tabel yang menunjukkan dasar perolehan hasil tersebut:

Tabel 7. Data Penghitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

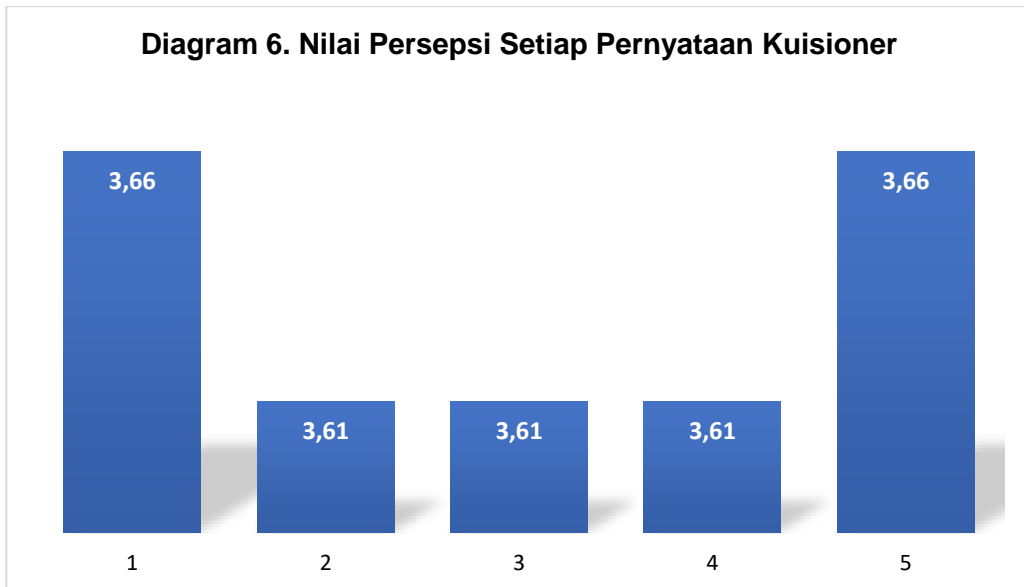
RESPONDEN (R)	JUMLAH BINTANG (★) SETIAP UNSUR					JUMLAH	RATA-RATA
	1	2	3	4	5		
R 1	6	6	6	6	6	30	6
R 2	6	6	6	6	6	30	6
R 3	6	6	6	6	6	30	6
R 4	5	5	5	5	5	25	5
R 5	4	4	4	4	4	20	4
R 6	6	6	6	6	6	30	6
R 7	6	6	6	6	6	30	6
R 8	6	5	6	6	6	29	5,8
R 9	6	6	6	6	6	30	6
R 10	5	5	5	5	5	25	5
R 11	6	6	6	6	6	30	6

R 12	6	6	6	6	6	30	6
R 13	6	6	6	6	6	30	6
R 14	6	6	6	6	6	30	6
R 15	6	6	5	5	6	28	5,6
R 16	5	5	5	5	5	25	5
R 17	6	6	6	6	6	30	6
R 18	6	5	5	5	5	26	5,2
R 19	3	3	3	3	3	15	3
R 20	6	6	6	6	6	30	6
R 21	5	5	5	5	5	25	5
R 22	6	6	5	5	6	28	5,6
R 23	5	4	4	4	4	21	4,2
R 24	5	5	5	5	6	26	5,2
R 25	5	5	5	6	6	27	5,4
R 26	6	6	6	6	6	30	6
R 27	5	5	4	4	4	22	4,4
R 28	4	4	4	4	4	20	4
R 29	6	6	6	6	6	30	6
R 30	6	6	6	6	6	30	6
R 31	6	6	6	6	6	30	6
R 32	4	4	5	5	5	23	4,6
R 33	6	6	6	6	6	30	6
R 34	4	4	4	4	4	20	4
R 35	6	6	6	6	6	30	6
R 36	6	6	6	6	6	30	6
R 37	5	5	6	5	5	26	5,2
R 38	6	6	6	6	6	30	6
R 39	6	6	6	6	6	30	6
JUMLAH	214	211	211	211	214	1061	212,2
RATA-RATA	5,49	5,41	5,41	5,41	5,49	27,21	5,44
SKALA 1-4	3,66	3,61	3,61	3,61	3,66	18,14	3,63
PERSENTASE	91,45	90,17	90,17	90,17	91,45	453,42	90,68
NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)							3,63
PERSENTASE NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)							90,68

Tabel 8. Kategori Nilai Persepsi Setiap Unsur Kuisisioner SPAK

NO.	PERNYATAAN KUISISIONER	SKOR SKALA 1-4	%	KATEGORI
1.	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.	3,66	91,45	(A) Sangat Baik
2.	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.	3,61	90,17	(A) Sangat Baik
3.	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.	3,61	90,17	(A) Sangat Baik
4.	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.	3,61	90,17	(A) Sangat Baik

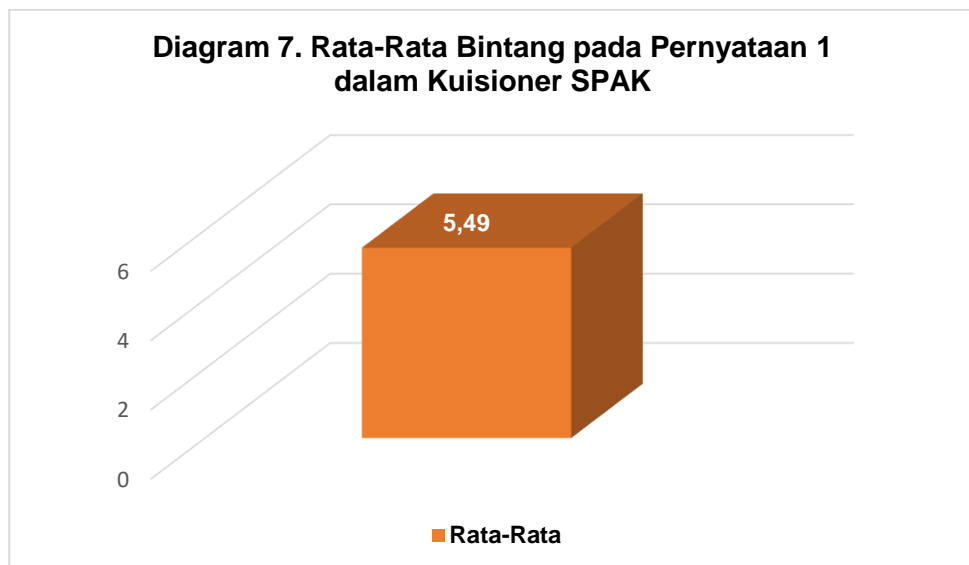
5.	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.	3,66	91,45	(A) Sangat Baik
----	--	------	-------	-----------------



Analisis data hasil Nilai IPAK untuk setiap pernyataan kuisiener didiskripsikan sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor (suku, agama, kekerabatan, almameter, dan sejenisnya).



Tabel 9. Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 1 dalam Kuisiener SPAK

BINTANG	JUMLAH	PERSENTASE
1 ★	0	0,00%
2 ★★	0	0,00%
3 ★★★	1	2,56%

4 ★★★★★	4	10,26%
5 ★★★★★	9	23,08%
6 ★★★★★★	25	64,10%
TOTAL	39	100,00%
RATA-RATA BINTANG (★)	5,49	

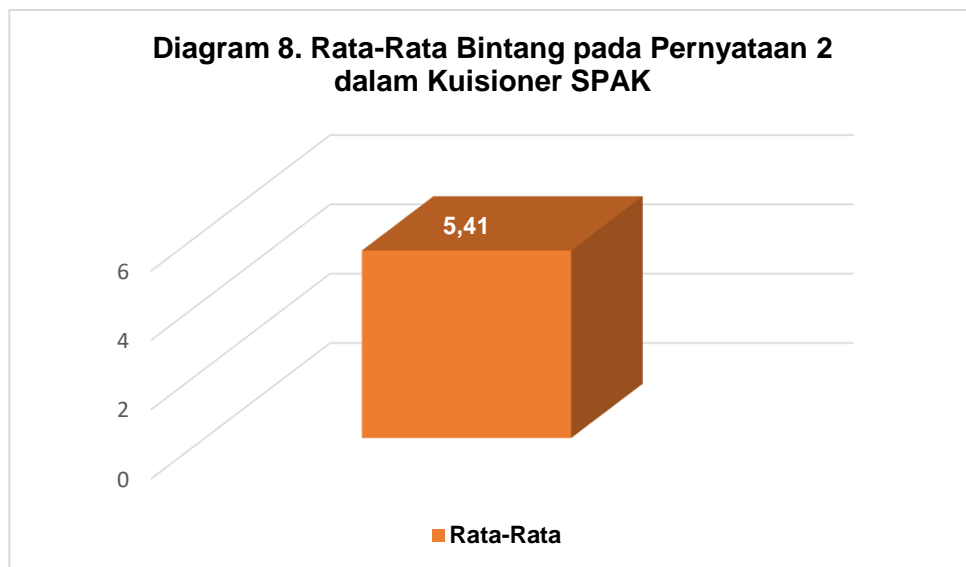
Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak adanya diskriminasi pelayanan ini berada pada angka **3,66** dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 9 tersebut, dapat dicermati bahwa mayoritas responden (64,10% atau 25 responden) memberikan skor bintang 6 pada pernyataan "Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap bahwa Petugas Layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memberikan layanan tidak membeda-bedakan berdasarkan faktor identitas tertentu yang bersifat subjektif.

Namun, terdapat juga 9 (23,08%) responden yang memberikan skor bintang 5, yang dapat diartikan bahwa aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan masih perlu ditingkatkan. Kemudian terdapat 4 (10,26%) responden yang memberikan bintang 4 dan 1 (2,56%) responden memberikan bintang 3, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden menganggap bahwa Petugas Layanan memperlakukan pengguna layanan diantara diskriminatif atau tidak. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa responden memberikan nilai pertengahan, diantara yakin atau tidak, ataupun ragu-ragu terhadap kebenaran kondisi dalam kenyataannya dengan pernyataan dalam kuisisioner.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Pertama dalam Kuisisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi oleh karena adanya 5 responden yang memberikan penilaian pada pertengahan jumlah bintang yang dapat menjadi pilihan, maka tetap diperlukan perbaikan terhadap unsur ada atau tidak adanya diskriminasi pelayanan yang dimaksud. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan pelayanan, terutama pada aspek perlakuan terhadap pengguna layanan. Perbaikan tersebut dimaksudkan agar petugas layanan benar-benar tidak membeda-bedakan pengguna layanan, sehingga tidak ada lagi pengguna layanan yang merasa ragu atau memberikan penilaian diantara setuju dan kurang setuju tentang tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyebortan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.



Tabel 10. Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 2 dalam Kuisisioner SPAK

BINTANG	JUMLAH	PERSENTASE
1 ★	0	0,00%
2 ★★	0	0,00%
3 ★★★	1	2,56%
4 ★★★★	5	12,82%
5 ★★★★★	10	25,64%
6 ★★★★★★	23	58,97%
TOTAL	39	100,00%
RATA-RATA BINTANG (★)	5,41	

Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak adanya kecurangan pelayanan ini berada pada angka **3,61** dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 10 tersebut, dapat dicermati bahwa mayoritas responden (58,97% atau 23 responden) memberikan skor bintang 6 pada pernyataan "Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

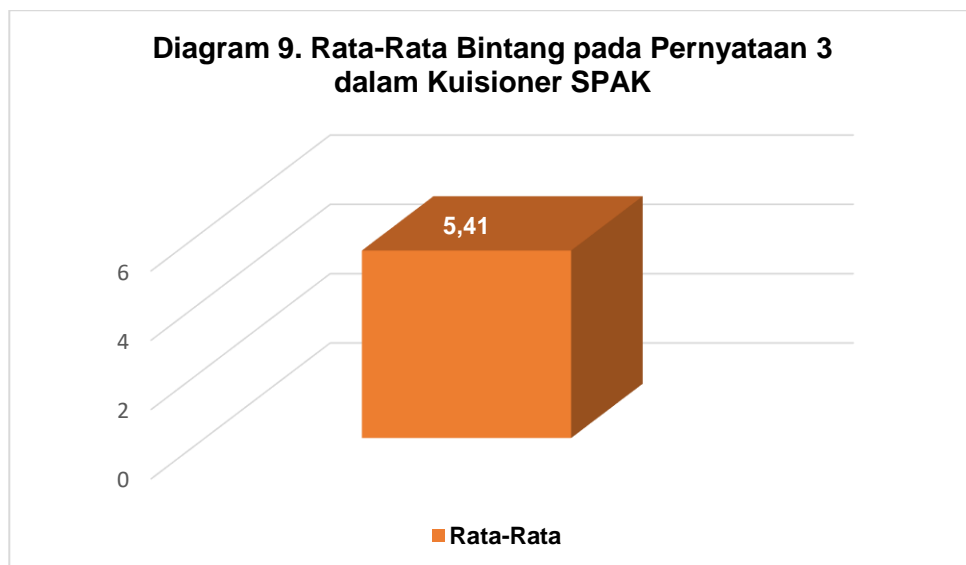
Terdapat 10 (25,64%) responden yang memberikan skor bintang 5, yang dapat diartikan bahwa aspek tidak adanya kecurangan pelayanan masih perlu ditingkatkan. Kemudian terdapat 5 (12,82%) responden yang

memberikan bintang 4 dan 1 (2,56%) responden memberikan bintang 3, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden memberikan penilaian (pertengahan) diantara setuju dan tidak setuju bahwa tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Kedua dalam Kuisisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi oleh karena adanya 6 responden yang memberikan penilaian pada pertengahan jumlah bintang yang dapat menjadi pilihan, maka tetap diperlukan evaluasi terhadap unsur ada atau tidak adanya kecurangan pelayanan yang dimaksud. Evaluasi dilakukan terhadap dokumentasi tertulis atas pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan yang menggambarkan kesesuaian pelaksanaan layanan dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll. di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll. diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, *resort* perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, *voucher* belanja, dll.) diluar ketentuan.



Tabel 11. Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 4 dalam Kuisisioner SPAK

BINTANG	JUMLAH	PERSENTASE
1 ★	0	0,00%
2 ★★	0	0,00%
3 ★★★	1	2,56%
4 ★★★★	5	12,82%

5 ★★★★★	10	25,64%
6 ★★★★★	23	58,97%
TOTAL	39	100,00%
RATA-RATA BINTANG (★)	5,41	

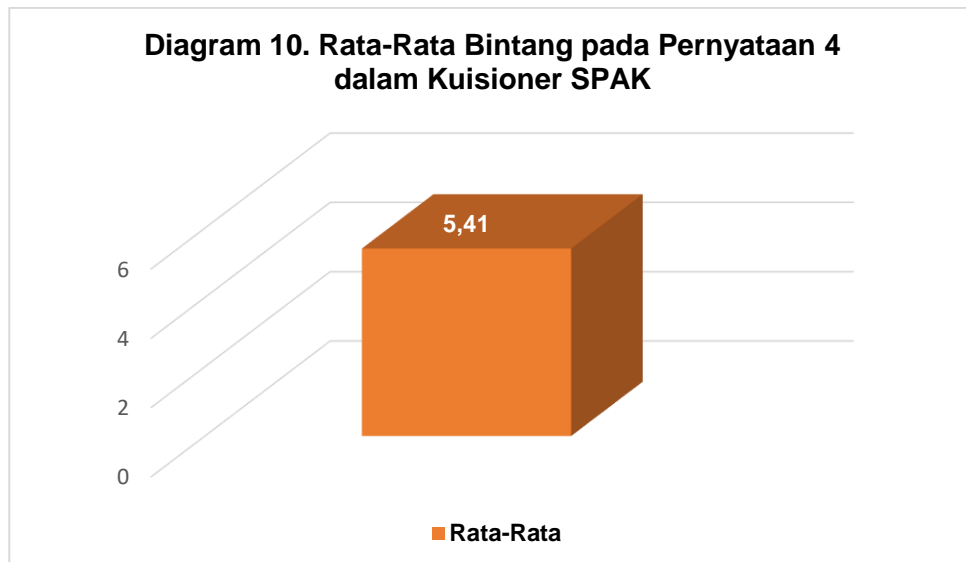
Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak adanya imbalan diluar ketentuan dalam layanan ini berada pada angka **3,61** dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 11 tersebut, dapat dicermati bahwa mayoritas responden (58,97% atau 23 responden) memberikan skor bintang 6 pada pernyataan "Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Terdapat 10 (25,64%) responden yang memberikan skor bintang 5, yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan masih tetap perlu ditingkatkan. Kemudian terdapat 5 (12,82%) responden yang memberikan bintang 4 dan 1 (2,56%) responden memberikan bintang 3, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden memberikan penilaian (pertengahan) diantara setuju dan tidak setuju bahwa tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Ketiga dalam Kuisisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi oleh karena adanya 6 responden yang memberikan penilaian pada pertengahan jumlah bintang yang dapat menjadi pilihan, maka tetap diperlukan upaya pencegahan terhadap adanya pemberian atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan yang dimaksud. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah secara rutin melaksanakan internalisasi anti gratifikasi kepada seluruh petugas layanan atau seluruh unsur aparaturnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terimakasih", dsb).



Tabel 12. Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 4 dalam Kuisisioner SPAK

BINTANG	JUMLAH	PERSENTASE
1 ★	0	0,00%
2 ★★	0	0,00%
3 ★★★	1	2,56%
4 ★★★★	5	12,82%
5 ★★★★★	10	25,64%
6 ★★★★★★	23	58,97%
TOTAL	39	100,00%
RATA-RATA BINTANG (★)	5,41	

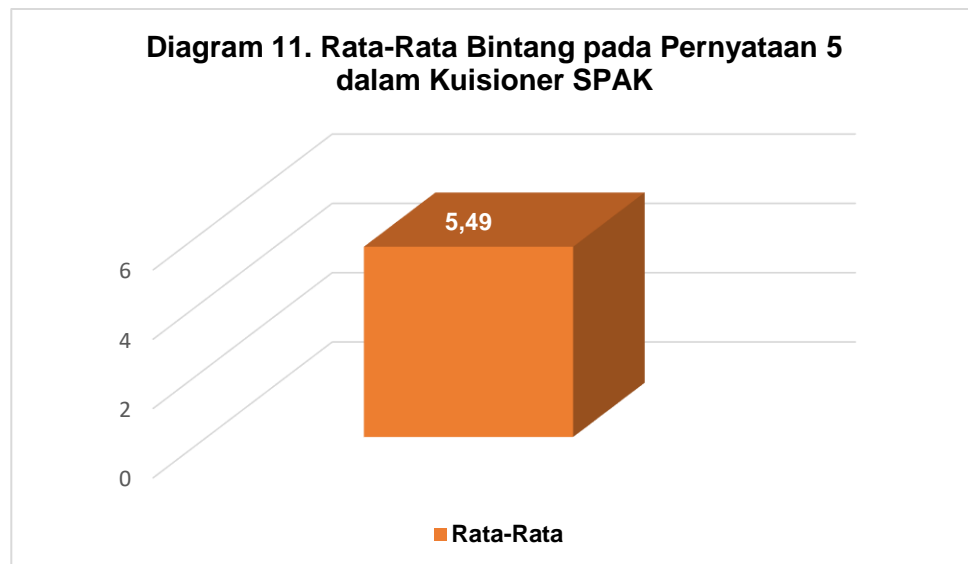
Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan ini berada pada angka **3,61** dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 12 tersebut, dapat dicermati bahwa mayoritas responden (58,97% atau 23 responden) memberikan skor bintang 6 pada pernyataan "Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Terdapat 10 (25,64%) responden yang memberikan skor bintang 5, yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan. Kemudian terdapat 5 (12,82%) responden yang memberikan bintang 4 dan 1 (2,56%) responden memberikan bintang 3, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden memberikan penilaian (pertengahan) diantara setuju dan tidak setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Keempat dalam Kuisisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi oleh karena terdapat 6 responden yang memberikan penilaian pada pertengahan jumlah bintang yang dapat menjadi pilihan, maka tetap diperlukan upaya pencegahan terhadap adanya pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan informasi biaya pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, baik pada media informasi dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.



Tabel 13. Jumlah dan Persentase Bintang pada Pernyataan 5 dalam Kuisisioner SPAK

BINTANG	JUMLAH	PERSENTASE
1 ★	0	0,00%
2 ★★	0	0,00%
3 ★★★	1	2,56%
4 ★★★★	5	12,82%
5 ★★★★★	7	17,95%
6 ★★★★★★	26	66,67%
TOTAL	39	100,00%
RATA-RATA BINTANG (★)	5,49	

Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan ini berada pada angka **3,66** dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)**

dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 13 tersebut, dapat dicermati bahwa mayoritas responden (66,67% atau 26 responden) memberikan skor bintang 6 pada pernyataan "Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Terdapat 7 (17,95%) responden yang memberikan skor bintang 5, yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan. Kemudian terdapat 5 (12,82%) responden yang memberikan bintang 4 dan 1 (2,56%) responden memberikan bintang 3, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden memberikan penilaian (pertengahan) diantara setuju dan tidak setuju bahwa tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Kelima dalam Kuisisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi oleh karena terdapat 6 responden yang memberikan penilaian pada pertengahan jumlah bintang yang dapat menjadi pilihan, maka tetap diperlukan upaya pencegahan terhadap percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan optimalisasi penyediaan Informasi Pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya baik pada media informasi dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*), sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan mempunyai pengetahuan yang baik tentang Pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Informasi yang menjadi pengetahuan masyarakat tersebut dapat digunakan sebagai modal bagi pengguna layanan untuk secara mandiri menyelesaikan kepentingannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan tidak lagi menggunakan calo/perantara tidak resmi.

C. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan pada uraian dan sajian Analisis Hasil Survei tersebut, diperoleh Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu **3,63** atau **90,68%** yang termasuk dalam kategori mutu **(A) Sangat Baik** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Walaupun telah diperoleh nilai yang Sangat Baik, akan tetapi terdapat beberapa catatan analisis yang harus menjadi perhatian dalam melaksanakan perbaikan layanan, agar pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya semakin optimal dan Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsinya dapat meningkat.

Tindak Lanjut tersebut juga diperlukan untuk mewujudkan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjadi Wilayah yang Bersih dari Korupsi sebagai bagian dari upaya Reformasi Birokrasi yang salah arahnya adalah kondisi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut ini merupakan Tindak Lanjut yang harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang diuraikan sebelumnya:

1. peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan pelayanan, terutama pada aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan;
2. evaluasi terhadap dokumentasi tertulis atas pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan yang menggambarkan kesesuaian pelaksanaan layanan dengan prosedur yang ditetapkan;
3. secara rutin melaksanakan internalisasi anti gratifikasi kepada seluruh petugas layanan atau seluruh unsur aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
4. meningkatkan penyediaan informasi biaya pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, baik pada media informasi dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*); dan
5. optimalisasi penyediaan Informasi Pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya baik pada media informasi dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*).

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

Tabel Data Kuisisioner Isian Responden

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Triwulan I Tahun 2023 (Periode Survei: Januari – Maret)

Tabel 14. Data Kuisisioner Isian Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No.*	UNSUR PENIALAIAN **					IDENTITAS RESPONDEN							JENIS PELAYANAN
	1	2	3	4	5	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	No. Tlp./HP	Alamat E-Mail	
1.	6	6	6	6	6	Abdus Syukkur	L	28	S1	SWASTA	081803043430	Syabdus@gmail.com	Informasi & Pengaduan
2.	6	6	6	6	6	Aditya Kusuma Respati	L	38	S1	ADVOKAT	085640880799	edoadityak@gmail.com	Informasi & Pengaduan
3.	6	6	6	6	6	Agoes Soeseno	L	53	S2	ADVOKAT	082233440872	agoes.soesenoshmm@gmail.com	Penyelesaian Perkara
4.	5	5	5	5	5	Alvin agiyanta kusuma putra	L	29	S1	SWASTA	085736811217	Akusuma182@gmail.com	Informasi & Pengaduan
5.	4	4	4	4	4	Anggi Adrian, SH	L	59	S1	ADVOKAT	081329781789	-	Informasi & Pengaduan
6.	6	6	6	6	6	Areza rinengga	I	25	S1	SWASTA	089654207760	arezarinengga@gmail.com	Pembinaan dan Pengawasan
7.	6	6	6	6	6	Arif sulaiman	L	40	S2	ADVOKAT	0878491993	arafisulaiman@gmail.com	Penyelesaian Perkara
8.	6	5	6	6	6	Bagoes Setyawan	L	54	S1	LAINNYA (Harap Sebutkan) - Guru	083833333804	bagoessetyawan64@gmail.com	Pengambilan Produk Pengadilan
9.	6	6	6	6	6	Bekti Harry Suwinto,SH,M.Pd,MH,C.Me.	L	40	S2	ADVOKAT	08125981792	langitpitu.harry@gmail.com	Informasi & Pengaduan
10.	5	5	5	5	5	Didi sunardi	Pria	57	S2	PNS/ASN	85814856277	didisunardiok@gmail.com	Pembinaan dan Pengawasan
11.	6	6	6	6	6	Djoko Prijono	Pria	51	S1	PNS/ASN	89681204800	djokoprijono5@gmail.com	Pembinaan dan Pengawasan
12.	6	6	6	6	6	Dr. Harsono Njoto	Pria	63	S3	ADVOKAT	0816532627	njotoharsono@gmail.com	Penyelesaian Perkara

13.	6	6	6	6	6	Drs. Kosdar, SH.	Pria	57	S1	ADVOKAT	08121614483	drs.kosdar.sh@gmail.com	Penyelesaian Perkara
14.	6	6	6	6	6	ENNI MARSARI,S.Pd	Wanita	42	S1	LAINNYA (Harap Sebutkan) - Guru	081357776698	marsari99@gmail.com	Informasi & Pengaduan
15.	6	6	5	5	6	Fattahul Anjab	Pria	42	S2	ADVOKAT	081230077486	fattahulanjab@gmail.com	Penyelesaian Perkara
16.	5	5	5	5	5	Feby Yusnia Azis	Wanita	26	SLTA/Sederajat	SWASTA	081359362789	febyyusnia1997@gmail.com	Informasi & Pengaduan
17.	6	6	6	6	6	Gigih Benah Rendra, SH., MH.	Pria	36	S2	PNS/ASN	081334838470	gigihbenahrendra.87@gmail.com	Penyelesaian Perkara
18.	6	5	5	5	5	Hari Wibowo	Pria	43	S1	ADVOKAT	08113478991	harryjazzmania@gmail.com	Penyelesaian Perkara
19.	3	3	3	3	3	hartono	Pria	47	SLTA/Sederajat	SWASTA	081330568391	-	Pembinaan dan Pengawasan
20.	6	6	6	6	6	IRNAWATI	Wanita	33	S2	PELAJAR/M AHASISWA	081252624438	md.irnaa@gmail.com	Pengambilan Produk Pengadilan
21.	5	5	5	5	5	Ivansyah	Pria	35	S2	SWASTA	081233540302	-	Informasi & Pengaduan
22.	6	6	5	5	6	Jayadi	Pria	41	S1	ADVOKAT	085331331343	advokat.jay@gmail.com	Informasi & Pengaduan
23.	5	4	4	4	4	Mohammad Arham	Pria	52	S1	ADVOKAT	085258604488	4rh4mr4uf71@gmail.com	Penyelesaian Perkara
24.	5	5	5	5	6	Muhammad Alif Fauzi	Pria	22	S1	PELAJAR/M AHASISWA	082233066509	muhammadalif.19091@mhs.unesa.ac.id	Penyelesaian Perkara
25.	5	5	5	6	6	Naily Madda Allin	Wanita	41	S1	PNS/ASN	08113199994	nailymadda@gmail.com	Pembinaan dan Pengawasan
26.	6	6	6	6	6	Naura Darrin Hasan	Wanita	20	S1	PELAJAR/M AHASISWA	087810223987	dzrnaura@gmail.com	Informasi & Pengaduan
27.	5	5	4	4	4	NOFI HARIYANTO	Pria	47	S1	ADVOKAT	081363234227	Lbhpkn2017@gmail.com	Informasi & Pengaduan
28.	4	4	4	4	4	Pandu Satriawan Zainulla	Pria	20	S1	PELAJAR/M AHASISWA	081333016159	pandusatriawan741@gmail.com	Penyelesaian Perkara
29.	6	6	6	6	6	Rabbenstain Izroiel	Pria	21	S1	PELAJAR/M AHASISWA	0811136155	Rabbenstain@gmail.com	Pengambilan Produk Pengadilan
30.	6	6	6	6	6	Rio Aldino Yosevan Silalahi	Pria	21	S1	PELAJAR/M AHASISWA	081336040895	rioaldino217@gmail.com	Informasi & Pengaduan
31.	6	6	6	6	6	Sekar Jayasari	Wanita	43	S1	PNS/ASN	081327448698	sekarjayasari.ur@gmail.com	Pembinaan dan Pengawasan
32.	4	4	5	5	5	Sri Wahyuni, S.Pd	Wanita	58	S1	PNS/ASN	081553715665	yunikarah51b@gmail.com	Informasi & Pengaduan

33.	6	6	6	6	6	Sumiati	Wanita	52	S1	LAINNYA (Harap Sebutkan)	087750328599	-	Penyelesaian Perkara
34.	4	4	4	4	4	Sumiyatun SH MH	Wanita	42	S2	PNS/ASN	081328164252	Sumiyatunsh@gmail.com	Penyelesaian Perkara
35.	6	6	6	6	6	Taufan Ainur Rahman	Pria	39	S1	ADVOKAT	081221808289	advtaufan99@gmail.com	Informasi & Pengaduan
36.	6	6	6	6	6	Tommy H Timbang Allo	Pria	32	S1	ADVOKAT	085234020491	-	Penyelesaian Perkara
37.	5	5	6	5	5	Tri Retno Herryani	Wanita	53	S3	ADVOKAT	081235735739	masraralawfirm@gmail.com	Penyelesaian Perkara
38.	6	6	6	6	6	Wahyudi	Pria	35	S1	SWASTA	085257313662	-	Informasi & Pengaduan
39.	6	6	6	6	6	Zainur Ridlo	Pria	30	S1	ADVOKAT	082333589905	-	Informasi & Pengaduan

Keterangan : * Kolom Nomor (No.) menunjukkan urutan dan jumlah Responden yang mengisi Kuisisioner.

** Kolom Unsur Penilaian merupakan jumlah bintang yang diberikan oleh Responden dalam Kuisisioner terhadap setiap Unsur Penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi. Unsur-unsur Penilaian tersebut yaitu:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena factor (suku, agama, kekerabatan, almameter, dan sejenisnya).
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyeboran antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/proedur, pengurangan denda, dll.
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pngan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bias dikamuflekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terimakasih", dsb).
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

B. Data Dukung Lainnya

1. Formulir Survei



SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) & SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Data Responden

* Nama Lengkap

* Jenis Kelamin

Pria

Wanita

* Usia

* No Telepon/HP

Alamat email

* Alamat Domisili

0 / 20000

* Pekerjaan

* Pendidikan

* SATKER YANG DISURVEI

* Jenis layanan Peradilan Tinggi TUN yang diterima

1. **Penyelesaian Perkara** (Pelayanan Gugatan PTTUN sbg Pengadilan Tingkat Pertama, Pelayanan Administrasi Banding, Pelayanan Upaya Hukum PTTUN sbg Pengadilan Tingkat Pertama)
2. **Pengambilan Produk Pengadilan** (Pelayanan Salinan Putusan, Pelayanan Surat Kuasa, Pelayanan Izin Penelitian dan Riset)
3. **Informasi & Pengaduan** (Permohonan Informasi, Penanganan Pengaduan)
4. **Pembinaan dan Pengawasan** (Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Kompetensi)

Berikutnya



SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) & SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Survei Persepsi Anti Korupsi

Jawablah kuesioner berikut dengan memberi tanda bintang:

- ★ Sangat Tidak Setuju
- ★★ Tidak Setuju
- ★★★ Kurang Setuju
- ★★★★ Setuju
- ★★★★★ Sangat Setuju
- ★★★★★★ Sangat Setuju Sekali

* 1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena factor (suku, agama, kekerabatan, almameter, dan sejenisnya).



* 2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyebortan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/proedur, pengurangan denda, dll.



* 3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pngan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi(hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.



* 4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Info: : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli , yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bias dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terimakasih”, dsb).



* 5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Info: : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubunga/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.



Sebelumnya

Kirim

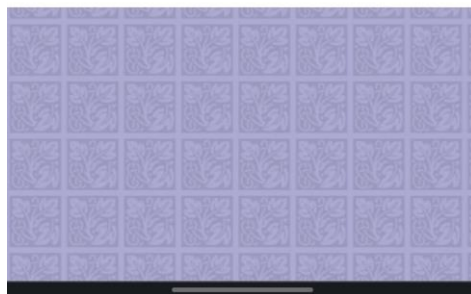
2. Contoh Tangkapan Layar pada Perangkat Responden yang Telah Mengirim Hasil Pengisian Kuisisioner Survei



Terima kasih telah berpartisipasi untuk membangun Pengadilan yang lebih baik.

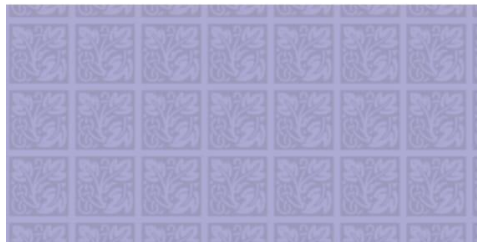


Terima kasih telah berpartisipasi untuk membangun Pengadilan yang lebih baik.

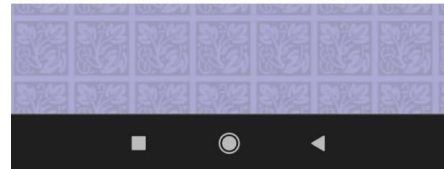




Terima kasih telah berpartisipasi untuk membangun Pengadilan yang lebih baik.



Terima kasih telah berpartisipasi untuk membangun Pengadilan yang lebih baik.



3. Keputusan Pembentukan Tim Survei



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
NOMOR : W3-TUN/ 289 /KP.04.6/1/2023**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka perlu dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi bagi Masyarakat Pencari Keadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 - h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - i. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**
- Pertama** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, untuk menjadi Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
- Kedua** : Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas :
- 1. Mengidentifikasi jenis layanan yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
 - 2. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi secara periodik;


Menganalisis

3. Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;
4. Membuat laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi secara berkala dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Januari 2023

Ketua,

D. S. H. M. H.
NIP. 195710111985031001



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung R.I, di - Jakarta;
3. Arsip.

Daftar Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya
Nomor : W3-TUN/289 /KP.04.6/1/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Koordinator	RINI SETIAWATI, S.E. NIP. 19750929 200604 2 002	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
2.	Sekretaris	MAULANA BINTANG BAHARI, S.A.P. NIP. 19950527 201903 1 004	Analisis Kepegawaian Pertama
3.	Anggota	1. EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H. NIP. 19750907 200003 1 002 2. MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. NIP. 19640204 198603 1 005 3. MOH. HAIRIL ANWAR, S.Kom., M.H. NIP. 19830429 200604 1 002	Panitera Muda Perkara Panitera Muda Hukum Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI


Ketua,
Dr. ISTIWI BOWO, S.H., M.H.
NIP. 19571011 198503 1 001